



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA IMPLEMENTASI TIKET KRL JABODETABEK BERBASIS NIK PADA 2025

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Ulayya Sarfina

Analisis Legislatif Ahli Pertama
ulayya.sarfina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerapkan sistem tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Rencana tersebut bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan transportasi publik dengan data kependudukan nasional, sehingga memudahkan monitoring dan perencanaan transportasi ke depannya. Kebijakan ini akan dikembangkan dengan menggunakan data kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri, dan berpotensi diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah merencanakan peningkatan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) menjadi Rp7,96 triliun dengan Rp4,79 triliun di antaranya dialokasikan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) yang akan dialokasikan untuk kereta api (KA) ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek dan layanan lainnya. Integrasi tiket KRL dengan NIK dan DTKS akan membantu pemerintah mengalokasikan PSO secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dapat menggunakannya untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan KA yang dananya bersumber dari penugasan PSO. Efisiensi alokasi penugasan PSO juga dapat diperoleh melalui skema perhitungan pendapatan nontiket (*noncore*).

Kebijakan tiket KRL berbasis NIK ini diharapkan membuat subsidi PSO yang selama ini dialokasikan untuk KRL lebih terarah dan efisien. Arah subsidi pada tarif akan mudah diimplementasikan ketika didukung dengan integrasi DTKS sehingga bisa diarahkan hanya untuk masyarakat tidak mampu. Pemisahan tarif tiket antara masyarakat yang berhak dan tidak berhak atas subsidi melalui sistem tiket berbasis NIK tentunya memerlukan biaya tambahan untuk verifikasi dan integrasi data dengan DTKS. Biaya tambahan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat pengguna, termasuk biaya perubahan atau *upgrade* alat bayar. Selain itu, pemerintah perlu memitigasi potensi gangguan layanan akibat migrasi sistem tiket, yang dapat memengaruhi kualitas layanan KRL, seperti antrean tiket dan proses verifikasi penumpang.

Rencana kebijakan ini masih dalam tahap kajian lebih lanjut dan memiliki beberapa tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mengintegrasikan sistem NIK dengan layanan tiket KRL. Sampai saat ini, belum ada kejelasan tentang model tiket yang akan diintegrasikan dengan NIK, dikarenakan masyarakat pengguna KRL dilayani oleh sejumlah kartu dari perbankan yang sudah terintegrasi dengan sistem tiket KAI selain kartu yang dikeluarkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Pemerintah melalui Kemenhub menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa implementasi sistem ini berjalan lancar. Selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga akan menjadi fokus utama guna memastikan seluruh pengguna KRL

memahami dan dapat beradaptasi dengan sistem baru ini. Dalam jangka panjang, penerapan tiket berbasis NIK ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Sistem ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pengguna KRL, tetapi juga berpotensi diterapkan pada moda transportasi lain di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Atensi DPR

Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub fokus pada peningkatan kualitas layanan KRL Jabodetabek, melakukan kajian mendalam dan perencanaan matang terhadap implementasi sistem tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK dengan mengantisipasi dampak penyalahgunaan data pribadi/NIK, memastikan subsidi PSO KRL Jabodetabek tepat sasaran, adanya sistem pemisahan antara masyarakat yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi, dan memitigasi gangguan layanan akibat migrasi sistem tiket yang akan berdampak pada kualitas layanan KRL. Komisi V DPR RI juga perlu mempertimbangkan tarif subsidi dan nonsubsidi yang akan diberlakukan agar tidak membebani masyarakat yang rentan secara ekonomi dan berhak mendapat layanan publik yang sama. Implementasi sistem ini agar nantinya disosialisasikan secara masif dan diberlakukan secara bertahap dengan melihat respon masyarakat.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 16 Agustus 2024;
Kompas, 20 Agustus 2024;
kontan.co.id, 21 Agustus 2024;
kumparan.com, 17 Agustus 2024.

Minggu ke-4 Agustus
(19 s.d. 25 Agustus 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.